

Rahmad Tegaskan Tak Ada Kenaikan PBB

BALIKPAPAN, TRIBUN – Aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak, selain mendatangi gedung DPRD Balikpapan, mahasiswa juga sempat berhadapan langsung dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.

Rahmad Mas'ud, memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Menurutnya, penyampaian pendapat adalah bagian dari proses demokrasi yang perlu dijaga bersama.

"Adik-adik kita sudah menyalurkan aspirasi dengan baik, ini bagian dari kebebasan berorasi. *Alhamdulillah*, semua berjalan lancar," kata Rahmad usai menemui peserta aksi unjuk rasa, Senin (1/09/2025).

Terkait isu lokal yang disuarakan, Rahmad menegaskan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan sudah memberikan jawaban, termasuk soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berjanji melakukan penanganan banjir secara maksimal.

"Untuk PBB saya pastikan tidak ada kenaikan. Sementara masalah banjir, kita berproses. Hampir di semua negara maju pun tidak bisa mencegah banjir sepenuhnya, tapi kami sudah melakukan langkah-langkah nyata, seperti pembangunan kolam retensi di belakang Pasar Segar seluas hampir 10 hektare," jelasnya.

Rahmad juga menyinggung persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram. Ia menegaskan, meski kewenangan ada di pemerintah pusat melalui Pertamina, Pemkot Balikpapan tetap berkoordinasi agar distribusi lebih tepat sasaran.

"Gas 3 kilogram itu diperuntukkan bagi keluarga miskin. Saya mengimbau masyarakat yang mampu jangan menggunakan LPG 3 kilogram, itu hak warga tidak mampu. Bahkan dalam agama, mengambil hak orang miskin adalah dosa," tegasnya.

Selain itu, Wali Kota juga memaparkan progres pembangunan infrastruktur, termasuk jalan. Ia menilai kondisi Balikpapan saat ini sudah jauh berbeda dibanding lima tahun lalu. "Kalau ditanya kapan selesai semua, sampai kiamat pun pembangunan tidak akan pernah berhenti. Kota terus tumbuh, fasilitas pasti selalu ada yang kurang. Tapi *insyaallah*, selama saya menjabat bersama Pak Wawali, kami akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat," ucapnya.

Rahmad menambahkan, keberhasilan Pemkot Balikpapan juga tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pada 2016 PAD hanya sekitar Rp500 miliar, kini sudah mencapai Rp1,3 triliun.

"Balikpapan tidak punya tambang, tidak punya sawit, tapi berkat kerja keras bersama, PAD kita menjadi salah satu yang tertinggi di Kaltim.

Dari PAD itu, kita bisa menjalankan program seperti BPJS gratis dan pendidikan gratis, termasuk bagi sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemkot," tuturnya.

Rahmad menegaskan, jabatan yang ia emban adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. "Saya lahir dan besar di Balikpapan, punya tanggung jawab moral. Jabatan ini bukan untuk bersenang-senang, tapi beban untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Kota Balikpapan," pungkasnya.

Meski demikian, massa tampak belum sepenuhnya puas. Beberapa mahasiswa menilai jawaban Wali Kota masih normatif dan jauh dari solusi konkret. "Pak Wali hanya mutar-mutar, yang kami minta kepastian, bukan ceramah," sindir seorang orator.

Rahmad juga menyampaikan progres pembangunan jalan dan infrastruktur lain. Ia mengakui pembangunan tak akan pernah selesai.

"Kalau ditanya kapan semua selesai, sampai kiamat pun pembangunan akan terus berjalan. Kota tumbuh, kebutuhan bertambah, tapi *insyaallah* kami akan berbuat terbaik," ucapnya. Pernyataan ini sontak memicu reaksi beragam, ada yang menganggap Rahmad realistis, ada pula yang menilai ia sekadar berkilah.

Meski begitu, aksi tetap berakhir damai tanpa gesekan. Para mahasiswa menegaskan akan terus mengawal janji Wali Kota. "Hari ini kami dengar langsung jawabannya, tapi kami juga akan catat dan tagih kembali. Jangan sampai semua hanya berhenti di podium," pungkas salah satu demonstran. (edo/znl)

Sumber berita:

1. TRIBUNKALTIM , Rahmad Tegaskan Tak Ada Kenaikan PBB, 02/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
2. Dalam Pasal 96 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi.
 - (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.